



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **GUNUNG HUTAPEA**
2. Jabatan : **KEPALA PUSAT**
3. NHK : **236978**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 7.300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 367 m2/369 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 11 m2/34 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.100.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 342 m2/337 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HADIAH Rp. 1.100.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HADIAH Rp. 1.100.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m2/200 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 500.000.000

1. MOBIL, HONDA CIVIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV CRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 10.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 6.110.985

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 7.816.110.985



III. HUTANG

Rp. 77.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 7.739.110.985

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.